

ANALISIS YURIDIS MENGENAI RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

OLEH

**TISYA SETIA RESTITI**

NIM. 0910110082



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2013**

## **ANALISIS YURIDIS MENGENAI RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS**

Tisya Setia Restiti

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Email: tisyarestiti@yahoo.com

### ***ABSTRAK***

Penulis mengangkat permasalahan Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh, adanya kerancuan dalam pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM), UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSL) khususnya bagi Perseroan Terbatas. Salah satu kerancuan tersebut adalah adanya perbedaan istilah yang digunakan dalam membatasi ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perbedaan istilah yang digunakan akan berdampak pada pembatasan mengenai ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dari hasil penelitian, analisis yuridis pengaturan mengenai ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan (selanjutnya disebut TJSL) bagi perseroan terbatas berdasarkan aspek subjek terdapat kekaburan norma mengenai subjek TJSL bagi perseroan terbatas dalam UU PT dan PP TJSL dan tidak ada pengaturan yang lebih khusus (*lex specialis*) *specialis* Dari aspek objek terdapat kekosongan norma mengenai objek kegiatan TJSL dalam UU PM, UU PT dan PP TJSL. Oleh karena itu, perlu adanya konsep yang tepat untuk membatasi ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Perseroan Terbatas

### ***ABSTRACT***

The author raised the issue of the scope of social and Environmental Responsibility of the company. Coinciding with the theme options, there is confusion in setting social and Environmental Responsibility in Act No. 25 of 2007 about Investing (UU PM), Act No. 40 year 2007 about company (UU PT) and PP No. 47 in 2012 about social and environmental responsibility for company (PP TJSL). One of the confusion is the differences existence of in the terms used in restricting the scope of social responsibility and the environment. Differences in the terms used will have an impact on the restriction of the scope of social responsibility and the environment. From the results of the research, the analysis of juridical arrangements regarding the scope of social responsibility and the environment (hereinafter referred to as TJSL) for company based on aspects of the subject there is a haze of norms regarding the subject of TJSL for company act in the PT and PP TJSL and there is no more specific arrangements (*lex specialists*) *specialists* from the aspect of the object there is the emptiness of the norm

regarding the object of activity of TJSL in law am, The PT and PP TJSL. Therefore, we need an appropriate concept to limit the scope of social responsibility and the environment.

Keywords: social and environment responsibility, company

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di Indonesia telah memasuki era globalisasi, sehingga dunia usaha dituntut untuk berkembang semakin pesat. Kondisi yang demikian ini mengakibatkan munculnya perseroan<sup>1</sup> yang melakukan usaha di berbagai bidang. Berbicara mengenai perseroan, maka tidak dapat dilepaskan dengan tujuan dari perseroan itu sendiri. Perseroan yang berdiri karena dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat tersebut, tumbuh dan berkembang dengan tujuan utama yaitu *profit oriented*.

Seiring dengan tujuan utama dari perseroan, perkembangan dunia usaha dewasa ini juga tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan eksternalnya. Yang dimaksud dengan lingkungan eksternal adalah lingkungan diluar perseroan. Perseroan selain mengejar keuntungan maka juga harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitar, agar aktivitasnya dapat berjalan dengan seimbang.

Namun demikian dalam kenyataannya, perusahaan masih menunjukkan sikap yang “meremehkan” peranan masyarakat dalam perusahaan, dengan dalih bahwa perusahaan hanya mencari keuntungan dan atau laba.<sup>2</sup> Menyikapi kondisi tersebut, dalam dunia usaha muncul berbagai diskursus yang berkaitan dengan pengelolaan dunia usaha itu sendiri, terutama berkaitan dengan tanggung jawab yang harus diemban oleh suatu perusahaan. Salah satu wacana yang muncul adalah lahirnya terminologi tanggung jawab sosial perusahaan

---

<sup>1</sup> Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya, Pasal 1 angka (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>2</sup> Isa Wahyudi & Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hal 14.

yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Corporate Social Responsibility*)<sup>3</sup> selanjutnya disingkat CSR.

Pada awalnya CSR hanya bersifat sukarela (*voluntary*). Hal ini sejalan dengan pendapat *Isa Wahyudi*, bahwa meskipun belum ada kesatuan bahasa dalam memaknai CSR, tetapi CSR ini telah diimplimentasikan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan.<sup>4</sup> Hal inilah yang menjadi masalah karena sifat kesukarelaan ini menjadi peluang perusahaan untuk tidak melaksanakan CSR. Hal itulah yang dikhawatirkan jika tidak ada pengaturan yang bersifat mengikat perusahaan untuk menjalankan CSR.

Oleh karena itu, muncul pengaturan mengenai CSR di Indonesia dengan menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Regulasi mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia dituangkan dalam hierarki perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta berbentuk Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Munculnya tiga regulasi diatas, maka menimbulkan kelegaan tersendiri bahwa sudah ada peraturan yang secara tegas mengatur tentang kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan terbatas atau yang sebelumnya dikenal dengan CSR. Saat ini perseroan tidak hanya dituntut mencari keuntungan atau laba semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Namun demikian, adanya pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 perlu diperhatikan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan, dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih menimbulkan kerancuan khususnya bagi Perseroan Terbatas yang dikenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal xv.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 28.

satu kerancuan tersebut adalah adanya perbedaan istilah yang digunakan dalam membatasi ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Perbedaan istilah tersebut akan berdampak pada pembatasan mengenai ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, ketiga peraturan tersebut sebenarnya juga belum mengatur dengan jelas dan tegas mengenai ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan, baik subjek maupun objeknya.

Oleh karena itu, agar pelaksanaan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dapat diterapkan dengan baik dan efektif maka perlu dilihat norma atau aturannya terlebih dahulu mengenai pengaturan ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Dengan demikian berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut, maka penulis merasa pentingnya pembahasan mengenai “Analisis Yuridis mengenai Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam Hukum Positif di Indonesia.”

## **B. MASALAH**

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis pengaturan mengenai ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas dalam:
  - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal?
  - b. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana konsep yang tepat untuk membatasi mengenai ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas di Indonesia?

## **C. METODE**

### **C.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian dengan jenis normatif ini akan dikaji mendalam mengenai pengaturan

ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji konsep yang tepat untuk membatasi mengenai ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

## **C.2 Pendekatan Penelitian**

### **1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mendeskripsikan pengaturan ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

### **2. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)**

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk membandingkan ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

### **3. Pendekatan Analitis (*analytical Approach*)**

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istiah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional.

### **4. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)**

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep yang mendasari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini dilakukan agar dapat dirumuskan konsep ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tepat bagi perseroan terbatas sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum tidak lagi ada pemahaman yang kabur.

## **D. PEMBAHASAN**

### **D.1 Analisis Yuridis Pengaturan mengenai Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas**

Pengaturan mengenai TJSL bagi perseroan ini perlu ditelaah dari segi ruang lingkungannya. Adapun pengertian ruang lingkup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ruang subjek yang tercakup.<sup>5</sup> Tetapi dalam hal ini tidak hanya ruang lingkup subjeknya saja melainkan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan yang tercakup dalam TJSL bagi Perseroan Terbatas.

#### **D.1.1 Pengaturan mengenai Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal**

Berbicara mengenai ruang lingkup tanggung jawab sosial maka seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa ada dua hal pokok harus diperhatikan antara lain ruang lingkup subjek yang tercakup dan ruang lingkup objek tanggung jawab sosial. Selain itu, ruang lingkup tanggung jawab sosial juga dapat dilihat dari penggunaan istilah yang digunakan.

##### **a. Ruang Lingkup berdasarkan Istilah yang digunakan dalam UU PM**

UU PM disahkan pada tanggal 26 April 2007. Undang-undang tersebut merupakan awal dari terbentuknya regulasi yang sebelumnya dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam UU PM konsep CSR diistilahkan dengan Tanggung Jawab Sosial.

##### **b. Ruang Lingkup berdasarkan Subjek Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas dalam UU PM**

Dalam Pasal 15 ditegaskan amanat bahwa, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama., Jakarta, 2012, hal 1185.

<sup>6</sup> Hendrik Budi Untung, *Op.cit*, hal.22

Adapun Pasal 15 huruf (b) UU PM berbunyi “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wajib adalah harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan), dan berkewajiban adalah mempunyai kewajiban; bertanggung jawab<sup>7</sup>. Oleh karena itu penanam modal mempunyai kewajiban atau bertanggung jawab untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dari ketentuan Pasal 15 huruf (b) UU PM tersebut, maka dapat ditelaah ruang lingkup subjek dari tanggung jawab sosial perusahaan yaitu berupa setiap penanam modal. Adapun definisi Penanam Modal dikemukakan dalam Pasal 1 angka (4):

Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Dari rumusan pasal tersebut maka ruang lingkup subjek tanggung jawab sosial dapat berupa perseorangan atau badan usaha. Perseorangan diartikan sebagai perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan.<sup>8</sup> Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidang usahanya, yaitu perusahaan perindustrian, perusahaan perdagangan, dan perusahaan perijasaan.

Selain perseorangan, dalam Pasal 1 angka (4) UU PM juga disebutkan subjek berupa badan usaha yang juga mempunyai kewajiban tanggung jawab sosial. Badan usaha diklasifikasikan menjadi dua yaitu badan usaha badan hukum dan badan usaha bukan badan hukum. Adapun badan usaha badan hukum terdiri dari Perseroan Terbatas, koperasi yayasan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan badan usaha bukan badan hukum terdiri dari persekutuan perdata (*maatschap*), firma, dan persekutuan komanditer (CV).

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, hal 1553.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hal 84.



Dapat disimpulkan bahwa menurut Pasal 15 huruf (b) *jo.* Pasal 1 angka (4) UU PM, tidak hanya Perseroan Terbatas saja yang mempunyai tanggung jawab sosial melainkan perseorangan dan badan usaha seperti yang dijelaskan sebelumnya juga mempunyai tanggung jawab sosial.

c. Ruang Lingkup berdasarkan Objek Tanggung Jawab Sosial dan Perseroan Terbatas dalam UU PM

Ruang lingkup objek yang dimaksud adalah pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial, agar terwujud secara efektif dan jelas. Dari pasal-pasal yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial yang terdapat dalam UU PM yaitu Pasal 15 huruf (b) dan Pasal 34 ayat (1). Kedua pasal tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai ruang lingkup objek pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial.

**D.1.2 Pengaturan mengenai Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas**

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa untuk membahas ruang lingkup maka ada dua hal yang harus dicermati yaitu mengenai ruang lingkup subjek dan objek dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Selain itu, ruang lingkup tanggung jawab sosial juga dapat dilihat dari penggunaan istilah yang digunakan.

a. Ruang Lingkup berdasarkan Istilah yang digunakan dalam UU PT dan PP TJSL

Berbeda dengan UU PM yang menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan, UU PT menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas yang sebelumnya dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perbedaan ini terletak pada kata lingkungan yang sebelumnya tidak

termuat dalam istilah UU PM, padahal kedua undang-undang ini disahkan pada tahun yang sama yaitu tahun 2007.

Sejalan dengan UU PT, dalam PP TJSL juga menggunakan istilah yang sama dengan UU PT yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena PP TJSL merupakan amanat dari UU PT untuk membuat peraturan pelaksanaan dari TJSL. Oleh karena itu, istilah yang digunakan antara UU PT dan PP TJSL sama yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

b. Ruang Lingkup berdasarkan Subjek Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam UU PT dan PP TJSL

Ruang lingkup berdasarkan subjek TJSL dapat dipahami dari penggolongan Perseroan Terbatas yang terdapat dalam UU PT dan PP TJSL. Kedua peraturan tersebut mempunyai keseragaman persepsi mengenai bidang usaha apa saja yang sebenarnya diwajibkan melaksanakan TJSL yaitu menggolongkan perseroan terbatas menjadi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

1. Perseroan Terbatas yang Kegiatan Usahnya Dibiidang Sumber Daya Alam

Penggolongan yang pertama adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam. Dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU PT dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP TJSL disebutkan mengenai maksud dari “Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Kedua peraturan tersebut memberikan penjelasan yang sama mengenai maksud dari perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam.

Adapun yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam hayati

dan nonhayati yang secara keseluruhan mempengaruhi ekosistem.<sup>9</sup>

Perseroan yang menjalankan usahanya dibidang sumber daya alam kiranya sangat jelas bagi siapapun. Perusahaan tambang, minyak dan gas, kehutanan dan perkebunan adalah contoh mereka yang disasar.<sup>10</sup> Selain itu, ada juga industri perkayuan, industri kertas.

## 2. Perseroan Terbatas yang Kegiatan Usahanya Berkaitan dengan Sumber Daya Alam

Penggolongan yang kedua adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam. Dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU PT dijabarkan mengenai maksud “perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Dari rumusan penjelasan tersebut maka timbul persoalan, bagaimana kriteria kegiatan usaha yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. UU PT tidak memberikan batasan mengenai kegiatan usaha yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Inilah yang menjadi persoalan sehingga rumusan pasal tersebut menjadi tidak jelas.

Kesimpulan dari dua penggolongan Perseroan sesuai Pasal 74 Ayat (1) adalah artikulasi ayat tersebut memang buruk, bahkan seakan menjebak banyak pihak dengan menaruh penjelasan yang berbeda (inklusif, mencakup seluruh perseroan) dengan kesan yang ditimbulkan pada bunyi ayat (diskriminatif, hanya berlaku

<sup>9</sup> Pasal 1 angka (9) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>10</sup> Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung. 2009, hal 130.

untuk perseroan berbasiskan SDA).<sup>11</sup> Akibat dari buruknya artikulasi ayat tersebut dapat menjadi celah bagi Perseroan yang bergerak tidak dibidang sumber daya alam, apakah ia berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam atau tidak, sehingga masih muncul kebingungan apakah suatu Perseroan tertentu diwajibkan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau tidak.

c. Ruang Lingkup berdasarkan Objek Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam UU PT dan PP TJSL

Ruang lingkup objek TJSL dapat dipahami dari istilah yang digunakan, perbedaan istilah tersebut akan berdampak pada ruang lingkup TJSL.

Pengaturan mengenai ruang lingkup TJSL Perseroan Terbatas akan lebih jelas apabila ada ketentuan mengenai bentuk dan batasan kegiatan yang akan dijalankan oleh Perseroan. Akan tetapi, sangat disayangkan dalam UU PT tidak ada ketentuan mengenai bentuk-bentuk dan batasan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas terkait dengan kewajiban TJSL.

Namun demikian, dalam PP TJSL terdapat ketentuan yang mengarah pada batasan kegiatan TJSL. Dalam pasal 3 ayat (2) PP TJSL dijelaskan bahwa “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan”. Dengan demikian, terdapat batasan ruang lingkup pelaksanaan TJSL yaitu TJSL dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan. Tentunya hal ini sangat menggembirakan, karena ruang lingkup pelaksanaan TJSL menjadi semakin jelas.

Walaupun ruang lingkup batasan pelaksanaan TJSL telah ditentukan, akan tetapi, tetap saja tidak ada pengaturan mengenai ruang lingkup objek pelaksanaan kegiatan dari TJSL yang dijalankan oleh Perseroan Terbatas.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 130

### **D.1.3 Konflik Norma dalam Pengaturan Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas**

Pengaturan mengenai ruang lingkup TJSL bersifat kabur. *Arief Sidharta, S.H.* menyebut norma yang kabur (*Vage Normen*) sebagai “pengertian yang kabur”. Pengertian yang kabur adalah pengertian yang isinya tidak dapat ditetapkan secara persis, sehingga lingkungannya tidak jelas. Tentang sebuah pengertian dapat dikatakan bahwa pengertian itu memiliki inti yang kurang lebih jelas, yang lingkungannya dapat ditentukan secara persis, tetapi bahwa disekelilingnya terdapat batas yang tidak jelas yang lingkungannya tidak dapat ditetapkan secara persis.<sup>12</sup>

Adapun konflik norma yang terdapat dalam pengaturan ruang lingkup TJSL adalah sebagai berikut

**Tabel 4.1**

#### **Konflik Norma dalam Pengaturan Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas**

<b>No.</b>	<b>Kategori</b>	<b>Konflik Norma</b>
1.	Istilah	Terdapat istilah yang tidak sinkron antara UU PM, UU PT dan PP TJSL
2.	Subjek	Terdapat kekaburan norma mengenai subjek tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dalam UU PT dan PP TJSL
3.	Objek	Terdapat kekosongan norma mengenai objek kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dalam UU PM, UU PT dan PP TJSL.

### **D.2 Konsep yang Tepat Untuk Membatasi Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Di Indonesia**

Adapun berbagai negara di dunia mempunyai sistem hukum yang berbeda satu sama lain. Adapun sistem hukum terdiri dari sistem hukum *Civil*

<sup>12</sup> Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti. 1999, hal 61.

*Law* atau Eropa Kontinental dan sistem hukum *Common Law* atau *Anglo Saxon*. Oleh karena itu, untuk membatasi ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas ini dilakukan dengan melihat model atau konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas dari negara baik yang mempunyai sistem hukum civil law dan sistem hukum common law agar diperoleh suatu konsep yang tepat.

#### **D.2.1 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Negara *Civil Law***

Berdasarkan pembagian sistem hukum tersebut, maka berikut merupakan beberapa negara *civil law* yang menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility*.

##### **1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Jerman**

Jerman mempunyai cerita atau kisah yang panjang mengenai keterlibatan sosial yang dilakukan oleh para pengusaha dalam masyarakat. Terdapat kekuatan sistem perlindungan sosial dan pasar tenaga kerja dalam ‘ekonomi pasar sosial’.

##### **2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Itali**

Pemerintah Itali mengartikan bahwa “*Corporate Social Responsibility*” adalah sebagai “*to be loyal to stakeholders*”. Dalam dunia bisnis, pelaksanaan CSR di Itali secara umum cukup tinggi, meskipun tidak terlalu tersusun dengan sistematis. Sistem sosial dan industrial muncul sebagai suatu bentuk tanggung jawab Negara Ekonomi itali terdiri atas usaha-usaha kecil dan menengah (*Small and MediumEnterprises/ SMEs*) dalam jumlah yang besar, dimana usaha-usaha tersebut memiliki jaringan serta ikatan yang kuat dengan komunitas lokal.

##### **3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Belanda**

Belanda memiliki tradisi dari negara yang kuat, bisnis dan masyarakat sipil mendukung adanya kebijakan sosial. Persetujuan atau kerja sama antara pemerintah dan “*social partners*” mendominasi lingkungan bisnis.

### **D.2.2 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Negara Common Law**

#### **1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Inggris**

Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas dalam *Companies Act* 2006, dimana pemerintah Inggris mewajibkan perusahaan publik melaporkan kinerja sosial dan lingkungan disamping kinerja usahanya.

#### **2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kanada**

Pemerintah Kanada memiliki kebijakan ketat menyangkut lingkungan, ekonomi, sosial warganya. Dalam menyusun regulasi CSR, departemen pemerintah yang membawahnya adalah departemen perindustrian.<sup>13</sup>

#### **3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di India**

CSR di India memiliki kekhasan tradisional yang merupakan bagian dari kedermawanan yakni “*classical paternalistic philanthropy*”. Bentuk CSR bisa diberikan melalui bantuan keuangan bagi sekolah-sekolah, rumah sakit, dan lembaga-lembaga kebudayaan.

### **D.2.3 Konsep yang Tepat Untuk Membatasi Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Di Indonesia**

- a. Konsep yang tepat dalam membatasi ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas berdasarkan istilah  
Berdasarkan istilah, konsep yang tepat untuk membatasi ruang lingkup TJSL adalah dengan menyeragamkan istilah yang digunakan.

Dengan demikian konsep yang tepat untuk membatasi ruang lingkup TJSL bagi perseroan terbatas adalah menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Istilah ini lebih jelas dan lebih rinci menggambarkan konsep *triple bottom lines* dan sesuai dengan tujuan yaitu untuk menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 57

lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

b. Konsep yang tepat dalam membatasi ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas berdasarkan subjek

1. Perseroan yang Menjalankan Kegiatan Usaha Dibidang Sumber Daya Alam

Secara umum, mengenai TJSL sesuai dengan UU PM, UU PT dan PP TJSL, maka tanggung jawab yang melekat pada perseroan terbatas adalah tanggung jawab dalam makna *liability*, yaitu tanggung jawab dalam konteks hukum, bukan hanya didasarkan atas tanggung jawab moral. Begitu halnya dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam juga merupakan tanggung jawab dalam makna *liability*.

Dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU PT dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP TJSL disebutkan mengenai maksud dari “Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Kedua peraturan tersebut memberikan penjelasan yang sama mengenai maksud dari perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam. Adapun yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan mempengaruhi ekosistem.<sup>14</sup> Sebagai contoh, Perusahaan tambang, minyak dan gas, kehutanan dan perkebunan adalah contoh mereka yang disasar.<sup>15</sup>

2. Perseroan yang Menjalankan Kegiatan Usaha Berkaitan dengan Sumber Daya Alam

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka (9) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>15</sup> Dwi Kartini, *Op.cit.*, hal 130.



Perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam ini belum memberikan pengertian yang jelas, sehingga perlu adanya konsep ruang lingkup perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Harus ada keseragaman persepsi mengenai makna “berkaitan” tersebut, artinya kriteria perseroan yang bagaimana yang dikatakan berkaitan dengan sumber daya alam. Sejauh ini konsep yang tepat dalam membatasi makna perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah dengan menitikberatkan atau fokus pada lokasi atau tempat perseroan berada. Sehingga tidak hanya berpegang pada dampak fungsi kemampuan sumber daya alam tetapi juga didasarkan pada lokasi perseroan berada.

Selain dengan menggunakan konsep lokasi untuk membatasi tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam, terdapat prinsip tanggung jawab yang melekat yaitu adanya prinsip tanggung jawab berupa *responsibility*. Berdasarkan prinsip tanggung jawab *responsibility*, yang dimaknai sebagai tanggung jawab etis atau moral, maka perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam sudah pasti dibebani tanggung jawab sosial dan lingkungan.

- c. Konsep yang tepat dalam membatasi ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas berdasarkan objek

Berdasarkan objek, konsep yang tepat dalam membatasi ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas adalah dengan tetap berpegang pada penggolongan subjek perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Berdasarkan konsep *Triple bottom line*<sup>16</sup> Kedua penggolongan tersebut berbeda. Perbedaan yang paling utama adalah pada aspek *Planet* atau lingkungan, mengingat penggolongan

---

<sup>16</sup> Konsep Triple bottom lines adalah konsep yang menegaskan bahwa kesuksesan suatu perusahaan harus diukur tidak hanya dari aspek keuangan, tetapi juga oleh aspek sosial dan lingkungan, Isa Wahyudi & Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hal 131.

perseroan sendiri didasarkan pada sumber daya alam yang erat kaitannya dengan lingkungan. Sedangkan untuk aspek *Profit* dan *People* tidak ada perbedaan.

Dalam *profit*, yaitu aspek ekonomi merupakan salah satu aspek dalam konsep *triple bottom line*, dimana kegiatan utama perseroan adalah untuk mencari keuntungan dari kegiatan yang dilakukannya.

Selanjutnya adalah aspek *social* atau masyarakat. Adapun aspek sosial ini dibagi menjadi 3 yaitu pihak intern sendiri yaitu karyawan dari perseroan, masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya.

Selain aspek sosial, yang terakhir adalah aspek *planet* atau lingkungan. Bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam maka ruang lingkup objek tanggung jawab lingkungan harus disesuaikan dengan kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Pelaksanaan TJSL dalam aspek lingkungan ini yang diutamakan adalah paling tidak perseroan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari kegiatan yang dijalankannya.

Sedangkan untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam, ruang lingkup objek kegiatannya adalah dengan melihat tempat perseroan tersebut berada, artinya perseroan harus bertanggung jawab atas lingkungan sekitar perseroannya sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan.

## **E. Kesimpulan**

1. Analisis yuridis pengaturan mengenai ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan (selanjutnya disebut TJSL) bagi perseroan terbatas antara Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM), Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSL) dapat ditinjau dari 3

aspek yaitu istilah, subjek, dan objek ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

- a. Ruang lingkup TJSL berdasarkan istilah antara UU PM, UU PT dengan PP TJSL terdapat ketidaksinkronan.
  - b. Ruang lingkup TJSL berdasarkan subjek dalam UU PM, UU PT dan PP TJSL mengandung kekaburan norma, yaitu adanya ketidakjelasan kriteria atau batasan penggolongan subjek TJSL dalam UU PT dan PP TJSL yang dibagi menjadi 2 yaitu perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam dan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam.
  - c. Ruang lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan objek antara UU PM, UU PT dengan PP TJSL terdapat kekosongan norma. Peraturan tersebut tidak memberikan pengaturan mengenai objek pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dijalankan Perseroan Terbatas..
2. Konsep yang tepat untuk membatasi ruang lingkup TJSL bagi Perseroan Terbatas di Indonesia dapat didapat berdasarkan pendekatan konsep *triple bottom lines* dan pendekatan perbandingan pelaksanaan TJSL di berbagai negara, baik ruang lingkup berdasarkan istilah yang digunakan, subjek, dan objek TJSL perseroan terbatas.
- a. Konsep yang tepat dalam membatasi ruang lingkup TJSL bagi perseroan terbatas berdasarkan istilah adalah dengan menyeragamkan istilah yang digunakan yaitu dengan menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan.
  - b. Konsep yang tepat dalam membatasi ruang lingkup TJSL bagi perseroan terbatas berdasarkan subjek adalah tetap dengan penggolongan. Perlu adanya kejelasan mengenai kriteria dari 1) perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam yaitu harus didasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan undang-undang lain; dan 2) perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam dapat menggunakan konsep yang

menitikberatkan atau fokus pada lokasi atau tempat perseroan berada untuk menyeragamkan makna “berkaitan”.

- c. Konsep yang tepat dalam membatasi ruang lingkup TJSL bagi perseroan terbatas berdasarkan objek adalah dengan membedakan objek kegiatan pelaksanaan TJSL berdasarkan konsep *triple bottom lines* antara Perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam dan Perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam

## F. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti. 1999.
- Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung. 2009
- Elvinaro Ardianto & Dindin M. Machfudz, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, Alex Media Komputindo, Jakarta, 2011.
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar grafika, Jakarta, 2008.
- Isa Wahyudi & Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2008.
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djamiati, *Argumenetasi Hukum*, Gajah mada University Press, Surabaya, 2005.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.